

ANALISIS INVENTARISASI ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019

Cicilia Apriliana Tungga

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the level of the importance and the performance of the implementation of factors that determine the successful inventory of assets in Rote Ndao Regency. Importance Performance Analysis (IPA) is used as an analysis tool to process research data. The results showed that asset inventory has not been fully optimal. This can be seen from the results of data analysis that is unbalancing between interest and performance levels. There are 4 inventory factors that are priority to improve performance, namely: regional asset logging activities in Rote Ndao District Government, improvement of updated data base, implementation of regional asset census to get correct and accurate asset data, and information technology capabilities and completeness of infrastructure facilities in the office supported by HR capabilities

Keywords: *inventory of regional assets , local government, Importance Performance Analysis (IPA).*

PENDAHULUAN

Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk harus menciptakan daya tarik didaerahnya agar dapat menarik dana investasi masuk ke daerah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, mampu menyediakan lapangan kerja, mempercepat proses pemerataan pembangunan guna mengentaskan kemiskinan. Selain menciptakan daya tarik investasi, pemerintah harus melakukan inventarisasi aset daerah untuk mengetahui potensi yang perlu di kembangkan dan dioptimalkan oleh daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran kepala daerah sangat penting untuk mengembangkan potensi kekayaan daerah berdasarkan aset yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik aset berwujud maupun tak berwujud. Perlu adanya proyeksi atau perkiraan yang cermat ke depan dari kepala daerah untuk mengembangkan kekayaan daeraah. Pengembangan potensi daerah tidak harus

dilakukan oleh daerah sendiri. Kerjasama dengan daerah lain ataupun pihak ketiga juga sangat penting agar melancarkan proses percepatan pemerataan pembangunan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Inventarisasi aset dilakukan oleh pemerintah daerah agar aset-aset yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan benar serta sebagai acuan untuk dilakukannya penilaian. Salah satu tujuan dari penilaian aset daerah adalah untuk kepentingan penyusunan neraca pemerintah dan laporan arus kas. Neraca dan laporan arus kas tersebut merupakan bentuk laporan bagi pemerintah daerah, yang di dalamnya mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Laporan pertanggungjawaban daerah yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat publik tertuang dalam neraca.

Arifin, Setiadi, dan Setiawan (2003: 10), mengatakan tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaan inventarisasi kekayaan milik negara sebagai berikut.

1. Tertib administrasi barang milik/kekayaan negara.
2. Pemanfaatan atas kekayaan negara dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.
3. Bahan informasi yang dapat diandalkan kebenarannya yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan kekayaan negara.
4. Mengetahui jumlah dan nilai barang serta sebagai bahan dalam penyusunan laporan keuangan negara.
5. Pengawasan atas kekayaan negara.
6. Sebagai bahan informasi untuk merencanakan, menganggarkan, mengarahkan dan menentukan kebutuhan barang yang selanjutnya dapat dipakai sebagai usulan kegiatan/proyek.
7. Sebagai pedoman dalam rangka penyimpanan dan pendistribusian barang.
8. Sebagai alat membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara.

Selain dimasukkan dalam neraca sebagai laporan kepada publik, inventarisasi aset merupakan salah satu tahapan dalam menyusun strategi pengembangan potensi ekonomi daerah. Menurut Suparmoko (2002: 99), tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha.

Aktiva tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara khusus dikelola oleh masing-masing unit kerja yang kemudian wajib untuk terus diperbaharui atau di *up to date*

dan dilaporkan ke unit kerja yang berwenang setiap periode waktu tertentu. Secara keseluruhan, pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kabupaten di Provinsi di Nusa Tenggara Timur yang mempunyai potensi di masing-masing sektor. Sektor yang menonjol di Kabupaten Rote Ndao adalah sektor pertanian, peternakan dan pariwisata. Untuk meningkatkan potensi yang ada, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta pelayanan publik yang memadai. Selain potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, ada juga beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai kendala yaitu pelayanan publik yang dinilai belum optimal, kegiatan ekonomi yang masih rendah, dan rendahnya kapasitas pengembangan potensi wilayah. Kajian dan kebijakan penunjang yang tepat perlu dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti kendala yang ada. Selain itu, perlu terus ditingkatkannya pengelolaan keuangan daerah dengan menggali sumber-sumber keuangan untuk belanja daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan mengandalkan potensi aset serta kekayaan yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dituntut untuk mengembangkan dan mendayagunakannya dengan fokus pada pengelolaan aset-aset, baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat non operasional. Untuk mengetahui potensi tersebut perlu dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, legal audit, penilaian aset, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan aset daerah tersebut.

Abdullah (2006) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis inventarisasi aset yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian menemukan adanya ketidakakuratan data dalam inventarisasi, kelemahan personel pengelola aset dan masih adanya aset yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Belum adanya sistem *data base* dan sistem informasi yang baik juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah.

Charafa, dkk. (2014), menganalisis kepuasan pengguna *Activity-Based Costing* (ABC) perusahaan Maroko mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan Maroko. Secara umum hasil penelitiannya adalah perusahaan Maroko harus berusaha lebih keras dalam memperbaiki penggunaan sistem penetapan biaya.

Mbipi (2014), menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan inventarisasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ende. Diagram IPA menunjukkan secara detail bahwa kinerja variabel pelaporan belum sesuai harapan

sehingga harus menjadi fokus perhatian dalam pengoptimalan aset agar tercapainya sistem inventarisasi aset tetap (*fixet asset*) yang baik di Kabupaten Ende.

Fokus penelitian ini terletak pada analisis tentang inventarisasi khususnya pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap semua aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagai rujukan dalam melakukan penilaian terhadap aset berdasarkan manajemen aset daerah guna mendapatkan informasi manajemen aset daerah. Selain untuk tujuan penilaian, inventarisasi aset juga sebagai salah satu langkah awal dalam menentukan strategi pengembangan potensi daerah Kabupaten Rote Ndao.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Quertani, *et al.* (2008: 27) aset didefinisikan sebagai suatu bentuk inti fisik, yang menghasilkan elemen-elemen nilai yang signifikan bagi organisasi, yang menyediakan dan mengharapkan jasa bagi organisasi, masih menyangkut pengertian aset. Siregar (2004: 178) mengartikan aset sebagai barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Aset dapat berupa finansial, fisik, ataupun tak berwujud. Aset bisa berupa aset lancar (*current*) maupun nonlancar (*noncurrent*). Aset memiliki berbagai bentuk. Satu perbedaan yang ada adalah antara aset finansial (misalnya kas) dan aset non-finansial. Aset non-finansial dapat berbentuk fisik atau berwujud (*tangible*) seperti bangunan, mesin, dan kendaraan bermotor. Aset juga dapat berupa aset tak berwujud (*intangible*) misalnya perangkat lunak komputer, yang mana memiliki hak cipta dan paten. Aset dapat juga berupa kombinasi antara aset berwujud dan tak berwujud, terutama di saat elemen ini beroperasi sebagai bagian integral dari suatu sistem, sistem keamanan dalam suatu gedung dapat berupa kombinasi dari peralatan fisik seperti kamera, komputer, dan alarm; dan sederetan perangkat lunak yang mengendalikan dan memonitor peralatan tadi.

Siregar (2004: 520) mengemukakan, tugas manajemen aset *real property* adalah mempertahankan, meningkatkan dan menjamin kontinuitas atau kelanjutan dari nilai dan manfaat properti. Penerapan sebuah konsep manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Lingkup manajemen aset daerah terdiri dari lima tahapan kerja.

1. Inventarisasi aset, yang terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik mencakup: lokasi dan alamat, jenis dan bentuk aset, luas

dan/atau jumlah aset, batas dan penunjuk khusus dan aspek legal terdiri atas status legal penguasaan atau pemilikan aset, batasan dan waktu penguasaan aset, ada atau tidaknya permasalahan legal.

2. Legal audit merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.
3. Penilaian aset, terdiri dari *review* hasil inventarisasi aset, inspeksi, penetapan nilai sesuai kelompok aset, dan catatan aset tidak dapat dinilai dan aset potensial.
4. Optimalisasi aset, terdiri dari *review* daftar aset potensial, analisis *highest and best use* aset potensial, rekomendasi dan langkah lanjut aset yang dapat dioptimalkan pendayagunaan, serta rekomendasi solusi aset yang tidak dapat dioptimalkan.
5. Pengawasan dan pengendalian, terdiri dari pengawasan dan pengendalian satu atap, pengembangan aturan atau kebijakan pengambilan keputusan strategis tentang perolehan, pemilikan, dan disposisi pengaturan aset, serta pengembangan sumber daya manusia. Secara skema dapat digambarkan sebagai berikut.

Langkah pertama dilakukan dalam proses manajemen aset adalah inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data pelaporan barang daerah (Kepmendagri No. 19 Tahun 2016). Budisusilo (2005: 9), menyatakan bahwa ruang lingkup inventarisasi aset meliputi:

1. pendekatan fisik dan legalitas;
2. kodifikasi/*labelisasi*;
3. pengelompokan aset;
4. pengembangan pencatatan daftar aset sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Secara skema, kegiatan inventarisasi aset dapat digambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta di daftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Suharno (2005), menyatakan bahwa inventarisasi diperlukan untuk mengetahui dengan pasti seluruh aset yang dikuasai oleh instansi-instansi di pemerintahan berikut badan hukum yang ada. Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses inventarisasi adalah:

1. proses inventarisasi harus dilakukan berdasarkan satu kesatuan pedoman yang berlaku untuk seluruh aset negara. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang seragam dan pada akhirnya nanti dapat dilakukan kompilasi;
2. proses inventarisasi harus dilaksanakan dengan mengacu kepada data dan kondisi yang sesungguhnya;
3. proses inventarisasi dituangkan tidak hanya pada data yang sifatnya atributik, melainkan mengikutkan informasi spasial yang menunjukkan titik lokasi aset tersebut berada.

Dalam usaha tertib administrasi pengelolaan barang daerah, khususnya pelaksanaan inventarisasinya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan atau pelaksanaan pencatatan, dan kegiatan atau pelaksanaan pelaporan. Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku-buku dan kartu-kartu berikut.

1. Buku Induk Inventaris (BII).
2. Buku Inventaris (BI).
3. Kartu Inventaris Barang (KIB).
4. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar sebagai berikut.

1. Daftar Rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang).
2. Daftar Mutasi Barang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan gabungan antara data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Secara lengkap variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Variabel 1 : pendataan aset daerah.
- 2) Variabel 2 : pencatatan aset daerah.
- 3) Variabel 3 : pelaporan aset daerah.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive stratifikasi sampling*. Sampel yang *purposive* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu dimana sampel dipilih dengan cermat sehingga sesuai dengan rancangan penelitian yang diusahakan agar dapat mewakili populasi, tergantung penelitian atau pertimbangan dari peneliti. Sampel yang dipilih menurut pertimbangan peneliti dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dan dianggap penting dalam pengelolaan aset daerah, yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, serta Bendahara Barang dari instansi-instansi pemerintah.

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Importance Performance Analysis* (IPA). IPA adalah sebuah teknik analisis yang dapat ditetapkan untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pencapaian, dapat mengembangkan pemasaran secara efektif (Martilla dan James, 1977: 77).

Penilaian faktor-faktor penentu berhasilnya inventarisasi aset di kabupaten Rote Ndao dilihat dari seberapa penting dan seberapa besar kinerjanya pengelola aset dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan oleh peneliti dan diisi oleh responden. Responden memberikan penilaian terhadap seberapa penting (dari “tidak penting” hingga “sangat penting”) faktor-faktor yang mempengaruhi inventarisasi aset di Kabupaten Rote Ndao dan responden juga memberikan penilaian terhadap kinerja (dari “buruk” hingga “sangat baik” dilakukan) inventarisasi aset di Kabupaten Rote Ndao. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 responden yang tersebar di 24 Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Rote Ndao.

Tingkat Kepentingan (*Importance*) dan Kinerja (*Performance*)

Skala penilaian dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan skala Likert. Skor tertinggi dari tiap-tiap item pertanyaan adalah 5 x 42 responden sama dengan 210. Sedangkan skor terendahnya adalah 1 x 42 responden sama dengan 42. Teknik perhitungan dapat dilihat sebagai berikut.

1	2	3	4	5
42=20%	84=40%	126=60%	168=80%	210=100%

**Skor Tingkat Kepentingan (*Importance*)
Berdasarkan Faktor-Faktor Keberhasilan Inventarisasi Aset**

No.	Isi Pertanyaan	Skor	%	Keterangan
	Variabel			
	Kegiatan Pendataan			
1	Pertanyaan 1	201	95.7	Sangat penting
2	Pertanyaan 2	198	94.3	Sangat penting
3	Pertanyaan 3	198	94.3	Sangat penting
4	Pertanyaan 4	203	96	Sangat penting
5	Pertanyaan 5	193	91	Sangat penting
6	Pertanyaan 6	197	94	Sangat penting
7	Pertanyaan 7	194	92	Sangat penting
8	Pertanyaan 8	196	93	Sangat penting
Kegiatan Pencatatan				
9	Pertanyaan 9	201	95.4	Sangat penting
10	Pertanyaan 10	196	93.7	Sangat penting
11	Pertanyaan 11	198	93.7	Sangat penting
12	Pertanyaan 12	175	81.7	Sangat penting
13	Pertanyaan 13	198	93.1	Sangat penting
Kegiatan Pelaporan				
14	Pertanyaan 14	195	93	Sangat penting
15	Pertanyaan 15	196	93	Sangat penting
16	Pertanyaan 16	196	94	Sangat penting

Hasil pengolahan data dari 16 item pertanyaan memperlihatkan bahwa penilaian responden terhadap pertanyaan-pertanyaan keberhasilan inventarisasi aset semuanya dinilai sangat penting. Pertanyaan yang menempati skor tertinggi adalah item nomor 4 dengan total skor 203. Sedangkan skor terendah sebesar 175 pada pertanyaan nomor 12. Penilaian tingkat kinerja berdasarkan pertanyaan-pertanyaan keberhasilan inventarisasi aset dapat dilihat pada tabel berikut.

**Skor Tingkat Kinerja (*Performance*)
Berdasarkan Pertanyaan-Pertanyaan Keberhasilan Inventarisasi Aset**

No.	Isi Pertanyaan	Skor	%	Keterangan
	Variabel			
	Kegiatan Pendataan			
1	Pertanyaan 1	149	71	Baik
2	Pertanyaan 2	162	77.1	Baik
3	Pertanyaan 3	156	74.3	Baik
4	Pertanyaan 4	153	72.9	Baik
5	Pertanyaan 5	154	73.3	Baik
6	Pertanyaan 6	159	75.7	Baik
7	Pertanyaan 7	137	65.2	Baik
8	Pertanyaan 8	114	54.3	Kurang baik
Kegiatan Pencatatan				
9	Pertanyaan 9	159	76	Baik
10	Pertanyaan 10	162	77	Baik
11	Pertanyaan 11	165	78.6	Baik
12	Pertanyaan 12	152	72	Baik
13	Pertanyaan 13	171	81	Sangat baik
Kegiatan Pelaporan				
14	Pertanyaan 14	175	83	Sangat baik
15	Pertanyaan 15	164	78.1	Baik
16	Pertanyaan 16	165	78.6	Baik

Tabel diatas memperlihatkan hasil pengolahan data penilaian responden terhadap tingkat kinerja inventarisasi aset di Kabupaten Rote Ndao dimana ada 2 pertanyaan yang dinilai sudah sangat baik dilakukan, 13 pertanyaan dinilai sudah dilakukan dengan baik dan ada 1 pertanyaan yang dinilai kurang baik dilakukan. Pertanyaan inventarisasi yang dinilai tinggi kinerjanya oleh responden dan menempati skor tertinggi adalah nomor 14 dengan skor 175. Sedangkan skor terendah sebesar 114 pada pertanyaan nomor 8. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa responden dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola aset di Kabupaten Rote Ndao. Tingkat kepentingan dan kinerja secara keseluruhan yang dilakukan oleh pengelola aset di Kabupaten Rote Ndao secara keseluruhan berdasarkan jawaban responden ditunjukkan dalam tabel berikut.

Importance Performance Inventarisasi Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao

No.	Pertanyaan	<i>Performance</i>	<i>Importance</i>	<i>Mean Difference</i>
		Mean	Mean	X-Y=Gap
1	Pertanyaan 1	3.5	4.8	-1.2
2	Pertanyaan 2	3.9	4.7	-0.9
3	Pertanyaan 3	3.7	4.7	-1
4	Pertanyaan 4	3.6	4.8	-1.2
5	Pertanyaan 5	3.7	4.6	-0.9
6	Pertanyaan 6	3.8	4.7	-0.9
7	Pertanyaan 7	3.3	4.6	-1.4
8	Pertanyaan 8	2.7	4.7	-2
9	Pertanyaan 9	3.8	4.8	-1
10	Pertanyaan 10	3.9	4.7	-0.8
11	Pertanyaan 11	3.9	4.7	-0.8
12	Pertanyaan 12	3.6	4.2	-0.5
13	Pertanyaan 13	4.1	4.7	-0.6
14	Pertanyaan 14	4.2	4.6	-0.5
15	Pertanyaan 15	3.9	4.7	-0.8
16	Pertanyaan 16	3.9	4.7	-0.7

Berdasarkan tabel diatas, gap terbesar antara tingkat kepentingan (*importance*) dan kinerja (*performance*) adalah pertanyaan atau faktor nomor 8 dengan selisih sebesar -2. Hal ini berarti terjadi kesenjangan antara tingkat kepentingan dan kinerja pada faktor nomor 8 sebesar 2 poin. Inventarisasi akan dikatakan berhasil hanya jika gap setiap pertanyaan bernilai nol, yang artinya tidak ada lagi kesenjangan antara tingkat kepentingan dan kinerja.

Diagram Importance Performance Analysis (IPA)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memasukkan *mean* masing-masing faktor yang ada di tabel diatas ke dalam diagram tingkat kepentingan dan kinerja (*importance performance*) untuk menentukan titik-titik dari setiap pertanyaan. *Mean* dari tingkat kepentingan dan *mean* dari kinerja secara keseluruhan digunakan untuk menentukan sumbu pembagian kuadran. Diagram *importance performance* faktor-faktor keberhasilan inventarisasi aset daerah Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat dalam gambar berikut.

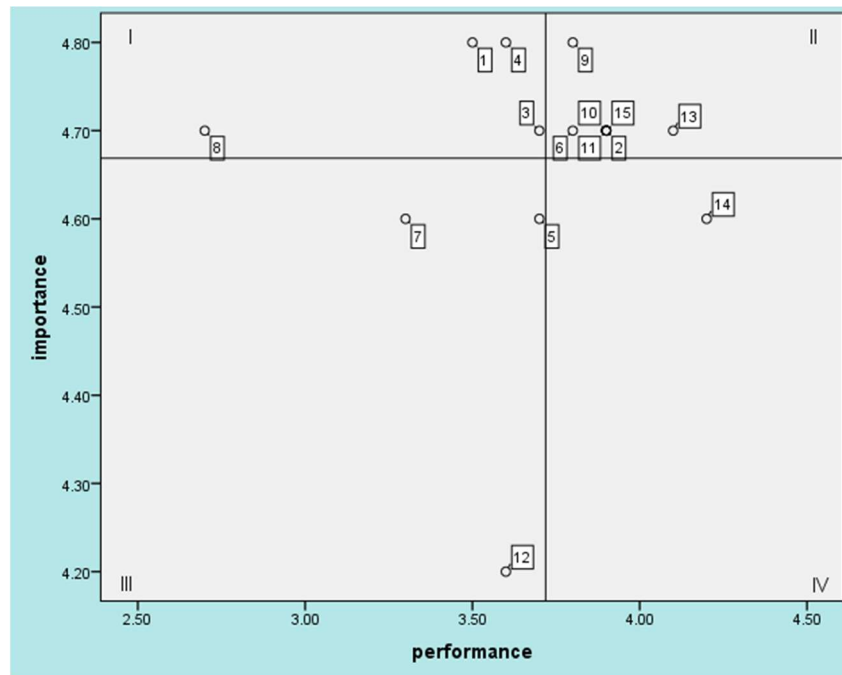


Diagram *Importance Performance Analysis*

Gambar diatas memperlihatkan faktor-faktor keberhasilan dalam inventarisasi aset di Kabupaten Rote Ndao dikelompokkan dalam empat kuadran. Keempat bagian tersebut adalah kuadran I, kuadran II, kuadran III dan kuadran IV. Penyebaran faktor-faktor tersebut tidak merata. Kuadran I terdapat pertanyaan nomor 1, 3.4 dan 8. Kuadran II terdapat faktor nomor 2, 6, 9, 10, 11, 13, 15 dan 16. Kuadran III terdapat faktor nomor 5, 7 dan 12. Kuadran IV terdapat pertanyaan nomor 14.

Terdapat 4 faktor yang menempati kuadran I. Kedelapan faktor ini memenuhi tingkat kepentingan yang tinggi namun kinerja inventarisasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor tersebut perlu dibenahi agar tingkat kepentingan sejalan dengan kinerja. Kualitas kegiatan pendataan dan pencatatan dalam kuadran I harus ditingkatkan dengan cara melakukan pelatihan dan pengawasan secara khusus dan berkelanjutan terhadap para pengelola aset. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik sistem manajemen aset daerah melalui sistem komputerisasi sehingga pengolahan data yang tersebar di seluruh unit kerja untuk mengetahui setiap perubahan data aset. Sarana dan prasarana yang ada dapat diperdagunakan secara optimal jika tersedianya kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Faktor-faktor yang terletak dalam kuadran II merupakan faktor yang dianggap penting dan kinerjanya inventarisasi dinilai berjalan sesuai dengan harapan. Ada 8 faktor yang menempati kuadran II, sehingga tugas dari pengelola aset adalah mempertahankan prestasi yang sudah ada.

Ada 3 faktor yang menempati kuadran III. Faktor-faktor ini dinilai kurang penting dan kinerjanya kurang baik. Diharapkan perlu adanya evaluasi terhadap ketiga item ini agar inventarisasi aset daerah di Kabupaten Rote Ndao lebih optimal.

Di kuadran IV hanya terdapat 1 (satu) faktor yang menempati kuadran tersebut. Faktor ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah baik, tetapi kurang penting dilakukan. Jika dimungkinkan, sumberdaya yang dialokasikan untuk faktor ini dapat dikurangi agar dapat menghemat pengeluaran pemerintah daerah. Hasil penghematan ini dapat alokasikan ke pertanyaan-pertanyaan lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi dan membutuhkan peningkatan kinerja, yaitu kegiatan-kegiatan pada kuadran I yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya dan kuadran II yang perlu juga menjadi perhatian agar prestasi yang sudah ada dipertahankan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut.

1. Persepsi responden mengenai tingkat kepentingan inventarisasi aset di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa dari 3 variabel (Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan Aset) yang dijabarkan menjadi 16 pertanyaan atau dapat dikatakan sebagai faktor tingkat kepentingan, semuanya dinilai sangat penting.
2. Hasil analisis dengan menggunakan IPA menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor penentu keberhasilan inventarisasi aset yang perlu mendapat perhatian lebih besar untuk ditingkatkan kinerjanya. Keempat faktor tersebut adalah:
 - a. Faktor nomor 1: Kegiatan pendataan aset daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rote Ndao
 - b. Faktor nomor 3: Perbaikan *data base* sudah di *up to date*
 - c. Faktor nomor 4: Pelaksanaan sensus aset daerah untuk mendapatkan data aset yang benar dan akurat
 - d. Faktor nomor 8: Kemampuan teknologi informasi dan kelengkapan sarana prasarana di kantor didukung oleh kemampuan SDM

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk meningkatkan sistem pendataan yang dinilai belum berjalan sesuai harapan agar kekayaan pemerintah terdata dengan jelas disertai dengan laporan yang akurat.
2. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perubahan pola pikir dalam wawasan aparat pengelola dan pengguna aset pada tiap unit kerja agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dengan harapan dapat meningkatkan pengelolaan aset yang semakin baik dan sebagai bentuk mendukung dan menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
3. Untuk kemudahan dan keakuratan data, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMBADA) melalui sistem komputerisasi, sehingga pengolahan data tersebar di seluruh satuan/unit kerja dan memiliki master *data base* untuk mengetahui setiap perubahan data aset daerah.
4. Pelatihan dan monitoring secara berkala perlu diberikan terhadap pengelola aset di tiap-tiap organisasi perangkat daerah agar kualitas sumber daya manusia pengelola aset di Kabupaten Rote Ndao semakin memberikan hasil yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Irvan Leonardo. 2005. "Analisis Inventarisasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman". *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana. UGM, Yogyakarta.
- Abeka, silvanice O. 2012. " Percieved Importance and Performance of Information Sistem in Azam Company-Dar Es Salaam", Marcrothink Institute, *International Journal of Learning & Developmet*, ISSN 2164-4063, Vol. 2, No. 3:9-24.
- Arifin, Bustanul, , Setiadi, Rizki, dan Setiawan, M. Yuris. 2003. Manajemen Kekayaan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 04, 02, 11-12.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Charafa, Karim, Ahmed Fath-Allah Rahmounib, 2014. *Using importance performance analysis to evaluate the satisfaction of Activity-Based Costing adopters*, *Accounting and Management Information Systems* Vol. 13, No. 4, pp. 665–685, 2014
- Martilla, J.A dan James, J.C, 1977. *Importance-Performance of Asset Management*, *Journal of Marketing*, Januari: 77-79.
- Mbipi, Herman Tali. 2014. " Analisis Inventarisasi Aset Tetap (*Fixed Asset*) Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2012". *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana. UGM, Yogyakarta.

- Quertani, M.Z., Parlikad, A.K., and Mcfarlane, D. 2008. "Towards An Approach to Select An Asset Information Management Strategy". *International Journal of Computer Science and Applications*. Vol. 5, No. 3b, pp 25 – 44
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik*, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Suharno. 2005. Strategi Pengelolaan Aset Negara. *Makalah Seminar Nasional*. MEP UGM. Yogyakarta. 4 Juni 2005.